



## KASUS PERDIN

# Eks Sekwan Kota Segera Disidang

**DENPASAR** - Setelah dua bulan lebih menjalani penahanan, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar, I Gusti Rai Suta, segera duduk di kursi pesakitan. Ini menyusul pelimpahan berkas dari Kejari Denpasar ke PN Denpasar.

Pelimpahan dilakukan Selasa (2/5) siang oleh jaksa bagian Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Denpasar. Kasipidsus Kejari Denpasar, Tri Syahru Wira Kosadha, mengungkapkan setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan, pihaknya tinggal menunggu jadwal sidang. "Berkas sudah lengkap dan kami siap sidang. Tinggal tunggu jadwal sidang," ujar Syahru Wira.

Yang menarik, Syahru langsung turun tangan sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan nanti. Syahru akan didampingi jaksa Sauca Arimbawa, Dewa Lanang Arya Raharja, Dewa Narapati, dan Putu Gede Suriawan. Di dalam persidangan nanti jaksa akan membuktikan dugaan korupsi dana perjalanan dinas (perdin) anggota DPRD Denpasar tahun 2013. Sebagai Sekwan, Rai Suta dianggap paling bertanggung jawab dalam kasus ini. "Untuk tim jaksa kami juga sudah siap," tegas Syahru.

Selain Rai Suta, jaksa sudah menyeret mantan Kabag Risalah Sekretariat DPRD Kota Denpasar IG Made Patra. Patra yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam perdin 2013, menjadi pintu masuk jaksa menyeret Rai Suta.

Dalam persidangan Patra dihukum pidana penjara satu tahun dan denda Rp 50 juta. Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp 2,2 miliar. Kerugian tersebut akhirnya ditanggung semua pihak terlibat perdin, tak terkecuali anggota DPRD Denpasar. (**san/dot**)

Edisi : ~~Selasa~~, Rabu, 3 Mei 2017

Hal : 8 21



## Radar Bali

# Pemprov Terancam Dapat Rapor Merah

### Banyak Kegiatan OPD Jadi Temuan BPK

**DENPASAR** - Pemprov Bali terancam kehilangan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat selama tiga tahun berturut-turut. Predikat WTP itu bisa lepas lantaran banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Informasi yang didapat koran ini, di antara temuan tersebut adalah lambannya kinerja OPD serta temuan administrasi lainnya. Bahkan, kabarnya BPK sudah memberikan alarm pada Pemprov Bali untuk menyelesaikan temuan yang ada. Jika tidak, maka hal tersebut akan berimbas pada capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali selanjutnya.

Menindaklanjuti temuan BPK, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali, kemarin (2/5) langsung dikumpulkan Wagub Ketut Sudikerta, di Kantor Inspektorat Provinsi Bali. Sudikerta meminta para pejabat tinggi itu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

"Jangan sampai lewat batas waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, maka akan berpengaruh pada dampak hukum nantinya. Kita harus bisa mempertahankan WTP yang telah diraih selama ini," ujar Sudikerta. BPK memberi waktu 60 hari setelah hasil pemeriksaan BPK, temuan tersebut wajib ditindaklanjuti.

Mantan Wabup Badung itu membeberkan, kebanyakan catatan-catatan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dalam bentuk administrasi. Dia berharap ada pembenahan secara sistematis, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kedepannya. Ditegaskan, yang bisa menyelesaikan semua itu tentu masing-masing OPD, jika tidak bergerak maka catatan tersebut tidak akan bisa terselesaikan. "Jadi saya minta kepada seluruh pimpinan OPD harus segera menindaklanjutinya," tandas politisi Golkar itu.

Warning juga disampaikan Inspektur Provinsi Bali, Ketut Teneng. Dikatakan, jika catatan-catatan temuan hasil pemeriksaan BPK RI untuk mendapat perhatian mas-



**Jangan sampai lewat batas waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, maka akan berpengaruh pada dampak hukum nantinya. Kita harus bisa mempertahankan WTP yang telah diraih selama ini,"**

**Ketut Sudikerta, Wagub Bali**

### Kegiatan OPD Pemprov Bali Yang Jadi Temuan

- Masalah pengelolaan di sejumlah perusahaan daerah Bali
- Volume kontrak kerja proyek dengan pihak ketiga
- Perjalanan dinas yang ternyata orangnya sudah meninggal
- Masalah bantuan Pemprov kepada partai politik
- Partai Hanura dan PDIP belum membuat LPJ, sementara dana sudah habis digunakan.



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

ing-masing OPD yang mendapatkan catatan dari BPK. Menurutnya, catatan-catatan tersebut akan berpengaruh pada penilaian WTP bagi Pemerintah Provinsi Bali. Dia meminta catatan tersebut harus mendapat perhatian khusus karena merupakan nilai kumulatif untuk meraih WTP. "Tentu akan ada monitoring untuk penyelesaian catatan-catatan tersebut," tegas mantan Karo Humas itu.

Kepada awak media Teneng menyebut bantuan parpol menjadi temuan BPK merupakan masalah administrasi parpol. Ini karena ada parpol yang sudah melakukan pergantian pengurus tapi pengurus baru belum merampungkan laporan pertanggung jawaban (LPJ).

Bantuan parpol 60 persen dari dana digunakan untuk kegiatan pengkaderan, serta 40 persen untuk operasional harus dipenuhi.

Pemprov Bali akan menyerahkan hasil temuan tersebut ke BPK apakah bisa dinyatakan sudah tuntas dan selesai. "Tetapi kalau sampai tidak ada kemajuan selama setahun maka ditegur ulang kembali dan akan mempengaruhi penilaian BPK kepada Pemprov Bali," terangnya.

Di sisi lain, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Bali, Jaya Suartama mengatakan bahwa memang ada dua parpol yang belum menyelesaikan LPJ. Dua parpol tersebut adalah PDIP dan Hanura. Keduanya diketahui

administrasinya belum lengkap, daftar pelatihan belum ada, notulen hasil rapat, tanda tangan dan daftar hadir. "Sudah saya lapor kepada Pak Wagub dan Inspektur, dua partai yang belum menyelesaikan LPJ sama Hanura," terang Suartama.

Dilatakan, saat ini Partai Hanura sudah mengerjakan dan sudah difasilitasi oleh Kesbangpol Pemprov Bali. Pihaknya juga terus mengingatkan soal LPJ bantuan parpol ini. "Cuna PDIP yang belum mengerjakan apapun, langkah sudah kita sikapi semua. Masa kami harus mengerjakan LPJ, uangnya sudah merka yang gunakan," sentilnya.

Menyikapi temuan BPK tersebut, DPRD Bali meminta Gu-

bernur dan Wagub Bali bertindak tegas. Dewan menilai pelaksanaan kegiatan OPD yang realisasi keuangannya di bawah ambang batas toleransi 80 persen, dari rencana anggaran. "Hal itu menunjukkan bahwa perencanaan yang kurang teliti dan berhati-hati," kata Ketua Pansus LKPD DPRD Bali, AA Adi Ardhana, dikonfirmasi terpisah.

Bahkan, lanjut Ardhana, sekalipun realisasi fisiknya sudah 100 persen akan tetapi belum tentu mencapai sasaran target yang ditetapkan RPJMD Provinsi Bali. Pelaksanaan program unggulan Bali Mandara pun dianggap belum maksimal dan terindikasi banyak kegiatan yang pelaksanaannya menyimpang dari perencanaan awal.

Dewan merekomendasikan agar gubernur segera memerintahkan pengawas internal untuk mengadakan pemeriksaan, sehingga lebih awal diketahui penyebabnya. Dengan demikian dapat sesegera mungkin mencari solusi. "Jangan sampai menjadi temuan bagi pemeriksa eksternal, yang hasilnya akan berpengaruh terhadap WTP yang telah diperoleh selama tiga tahun secara berturut-turut," tukas politisi PDI Perjuangan itu. (san/dot)

Edisi : Selasa, Rabu, 3 Mei 2017

Hal : 22



## KORUPSI

### Berkas Kasus Pungli Mandek di Polisi

**TABANAN** - Selain terjadi pergeseran pasal dan UU yang dikenakan, perkara pungutan liar (pungli) di Tabanan juga masih jalan di tempat. Sudah sebulan lebih sejak dikembalikan jaksa pada 23 Maret lalu, hingga kini berkas itu malah mandek di penyidik kepolisian. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Tabanan I Bagus Putra Gede Agung dikonfirmasi kemarin (2/5) mengaku belum menerima kembali berkas kasus pungli yang sudah dikembalikan ke penyidik kepolisian. Kasus yang dikembalikan itu adalah terkait pungli di Pasar Senggol Jalan Gajah Mada, Tabanan dengan tersangka Gede Komang Suryanta alias Mang Regae; dan kasus pungli parkir manuver di Pasar Tabanan dengan tersangka Made Budiarta. "Belum kami terima lagi," kata Agung.

Di bagian lain, Wakapolres Tabanan yang juga Ketua Tim Saber Pungli Tabanan Kopol Leo Martin Pasaribu ketika dikonfirmasi kemarin tak menampik hal tersebut. Dia mengaku, masih dalam proses melengkapi berkas sesuai petunjuk kejaksaan. Meski demikian, Leo belum bisa memastikan kapan berkas itu disetor kembali ke jaksa. "Hingga kapan (berkas diserahkan ke kejaksaan) belum bisa saya jawab," aku Leo.

Leo juga mengaku tidak ada batas waktu bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Padahal, kasus ini adalah bagian dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sudah jelas pelaku, saksi dan barang buktinya. "Saya tidak tahu kapan akan bisa dibawa ke jaksa," tuturnya.

Sekadar diketahui, dalam pungli di Pasar Senggol, Mang Regae adalah pemungut karcis retribusi pedagang senggol. Saat memungut retribusi, 13 Februari 2017 malam dia ditangkap. Karena nominal yang dipungut melebihi ketentuan resmi yang ditentukan Pemda. Dari tangannya juga disita uang senilai Rp 1 juta. Sedangkan kasus pungli tukang parkir di parkir manuver Pasar Tabanan, Budiarta dicokok 9 Februari 2017 karena memungut lebih dari ketentuan. Mestinya mobil hanya dikenakan Rp 2.000, namun dipungut Rp 4.000. Meski demikian, keduanya tidak ditahan, dan tidak dikenakan menggunakan Pasal 12 huruf e terkait penyelenggara negara yang melakukan pungli yang ancamannya minimal penjara 4 tahun dan maksimal 20 tahun, melainkan hanya Pasal 368 KUHP tentang pemerasan yang ancamannya maksimal 9 tahun. (yor/gup)

Edisi : Selasa, Rabu, 3 Mei 2017

Hal : 20